

# *The Effect Of Village Financial Management And Internal Control System On APBDES Accountability (Empirical Study of Villages in Pamulihan District, Sumedang Regency)*

Novita Nurfitriyani<sup>1</sup>, Tita Kartika<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas April

[novitanurfitriyani.feb@unsap.ac.id](mailto:novitanurfitriyani.feb@unsap.ac.id), [tita.feb@unsap.ac.id](mailto:tita.feb@unsap.ac.id)

---

## Article Info

### Article history

Received: 2 May 2024

Revised: 30 May 2024

Accepted: 23 Jun 2024

### Keywords:

Village Financial Management, Internal Control System, APBDes Accountability

## ABSTRACT

Accountability must be realized in the financial management of the village government, so that all village government activities can be accounted to the community. One that can support the success of APBDes accountability is the existence of a good internal control system within the village government. This study aims to determine the effect of village financial management and internal control system on APBDes accountability. This research was conducted using quantitative methods with primary data. The data collection technique in this study used a questionnaire with a sample number of 44 respondents determined using purposive sampling techniques. The results of this study show that village financial management variables have a positive and significant effect on the accountability of APBDes with a GIS value of  $0.000 < 0.05$ . The internal control system has a positive and significant effect on the accountability of the APBDes with a GIS value of  $0.029 < 0.05$ . And village financial management and internal control systems have a positive and significant effect on APBDes accountability with a sig value of  $0.000 < 0.05$ .



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

## Corresponding Author:

Novita Nurfitriyani,

Program Studi Akuntansi,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Jl. Angkrek Situ No.19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Telp (0261) 202911

Email: [novitanurfitriyani.feb@unsap.ac.id](mailto:novitanurfitriyani.feb@unsap.ac.id)

---

## INTRODUCTION

Desa di Indonesia menjadi cikal bakal dalam kehidupan masyarakat baik dalam politik maupun pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dapat mengelola secara mandiri keuangan desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah pusat selaku *principal* melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi dengan nama siskeudes (Sistem Informasi Keuangan Desa) untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dan mendukung akuntabilitas APBDes yang dikelola oleh pemerintah desa. Siskeudes adalah sebuah aplikasi yang digunakan dalam pembuatan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah di mana dalam pengaplikasiannya diperlukan sumber daya

manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan desa melalui siskeudes (Kartika, 2022). Siskeudes dapat mempermudah aparat pemerintah desa dalam pembuatan peraturan APBDes dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yaitu berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dari segi proses, pencatatan, pengelolaan dan juga pelaporan keuangannya. Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa akuntabilitas semakin baik apabila dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan serta memperoleh informasi yang relevan dan mudah dipahami (Saputra, dkk., 2021).

Pengelolaan APBDes sebagai proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, perlu dilakukan kajian akuntabilitas, dalam rangka tersedianya informasi yang handal dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa (Dharmakarja, dkk., 2020).

Akuntabilitas dan aspek akuntabilitas yaitu kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Nurcahya, 2021). Akuntabilitas harus dapat diwujudkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, sehingga semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu yang dapat mendukung keberhasilan akuntabilitas APBDes yaitu dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik di lingkungan pemerintah desa (Husain dan Seber, 2023).

Keterlibatan sistem pengendalian internal dalam mengelola keuangan desa menjadikan lebih terbuka dan transparan. Pengendalian internal ini dibutuhkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Nugroho, et.al., 2022).

Menurut Husain dan Seber, (2023) dengan sistem pengendalian internal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi. Dan pada akhirnya akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik bagi pemerintah desa.

Permasalahan umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa yang ada di kecamatan pamulihan kabupaten Sumedang terkait keterbatasan dalam akuntabilitas adalah, sebagai berikut :

1. Keterlambatan dalam pencairan dan serta sumber dana yang tidak sesuai dengan rencana;
2. Dengan banyaknya anggaran yang begitu besar, adanya jumlah pelaporan yang beragam serta titik kritis dalam pengelolaan APBDes menuntut tanggungjawab yang besar;
3. Terdapat anggaran yang tidak disusun secara terpadu serta minimnya pemahaman aparat desa tentang anggaran.;
4. Pada proses pertanggungjawaban minimnya tanggungjawab aparat terhadap penggunaan anggaran desa kepada masyarakat.;
5. Lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga sering terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat.;
6. Monopoli anggaran dimana dominasi penyelenggara desa dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran desa masih sangat besar;
7. Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban masih dianggap rumit oleh aparat pemerintah desa;
8. Kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kurang tepat terhadap pelaksanaan dokumen sebelumnya yaitu RKPDes dan RPJMDes.

Berikut data anggaran desa yang didapat setiap desa se-Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang:

**Tabel 1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022**

No	Nama Desa	Anggaran	Realisasi
1	Cigendel	2.053.057.000	2.094.834.000
2	Cijeruk	1.761.411.000	1.763.062.181
3	Pamulihan	1.772.837.000	1.776.284.260
4	Haurngombong	1.622.879.000	1.623.873.075
5	Cilembu	1.648.923.000	1.672.991.000
6	Cimarias	2.091.480.000	2.091.756.562
7	Cinanggerang	1.547.496.000	1.565.883.000
8	Mekarbakti	1.699.311.000	1.701.586.983
9	Sukawangi	1.726.163.900	1.731.156.509
10	Ciptasari	1.584.126.000	1.586.075.915
11	Citali	1.844.291.000	1.846.244.380

Berdasarkan tabel , dapat dilihat bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Pamulihan terkait anggaran dan realisasi telah berjalan dengan baik. APBDes berisi tentang penjabaran kebutuhan dan sumber dana dalam mengelola desa selama satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Prioritas dalam penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan skala lokal seperti pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan serta membiayai pemberdayaan masyarakat (Yuliasuti, dkk., 2022).

Resiko yang terjadi di beberapa desa yaitu pendampingan desa masih belum optimal karena jumlahnya yang terbatas, apalagi pendamping desa ini bukan berasal dari masyarakat lokal sehingga masih terbatas dalam memahami kultur masyarakat desa setempat. Kendala lainnya desa belum memiliki dukungan untuk sarana dan prasarana serta prosedur dalam pengelolaan keuangannya, serta kurangnya kemampuan dan pemahaman masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang dikatakan cukup tinggi khususnya untuk aparat pemerintah desa itu sendiri (Sucahyo, 2019).

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa. Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum seimbang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kualitas dan segi kuantitasnya.

Dalam *accountability framework*, faktor individu dan sistem yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola keuangan desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa dapat berjalan dengan maksimal (Mualifu, dkk., 2019). Faktor kedua dalam mendukung akuntabilitas adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Faktor ketiga dalam mendukung akuntabilitas adalah peran perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti tertarik tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas APBDes (Studi Empiris Desa-desa di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang)”**.

## LECTURE STUDY

### 1. *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (dalam Chalimatus, 2021:24), bahwa teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara keputusan tertentu (*principal*) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent*). Teori keagenan dijadikan teori utama karena teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai *agen* dan masyarakat sebagai *principal* yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat.

### 2. **Akuntabilitas APBDes**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Machfiroh, 2018).

Menurut Raharjo, (2020:50) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Pengurus Desa (BPD) dalam peraturan desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes ini memuat sumber- sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam 1 tahun anggaran.

### 3. **Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa serta pembinaan dan pengawasan.

### 4. **Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Yuliasuti, dkk (2022), Sistem Pengendalian Internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum serta kebijakan manajemen telah dijalankan sebagaimana mestinya.

Sistem pengendalian internal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai dalam melindungi aset agar terhindar dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan agar pencapaian tujuan terlaksana dengan baik.

## METHOD

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui kuesioner yang lebih efektif dan efisien untuk dilakukan pada subjek yang jumlahnya banyak. Populasi penelitian ini yaitu Perangkat Desa pada Desa-desanya di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari 11 (sebelas) desa dan setiap desa diambil 4 orang perangkat desa yang akan dijadikan responden yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa/Kaur keuangan dan Kaur Perencanaan

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti (Sugiyono, 2018:138).

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa perangkat desa tertentu yang lebih memahami terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan.

## RESULTS AND DISCUSSION

### 1. Results

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas APBDes pada Desa-desa di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, berdasarkan jawaban responden telah memenuhi syarat uji validitas dan reabilitas.

#### a. Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan Keuangan Desa (X1)	44	56.00	70.00	63.6364	4.75488
Sistem Pengendalian Internal (X2)	44	45.00	60.00	52.5227	3.15114
Akuntabilitas APBDes (Y)	44	39.00	50.00	44.3182	3.50264
Valid N (listwise)	44				

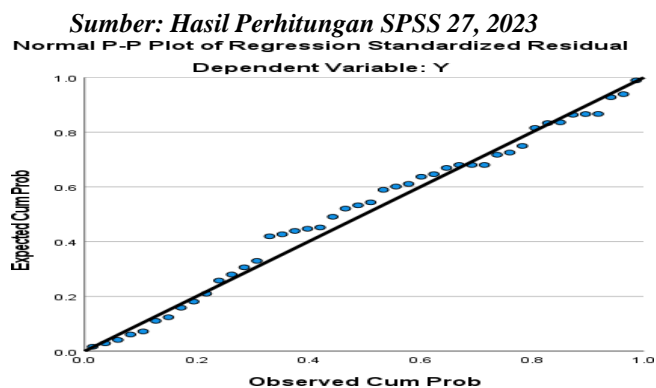
*Sumber: Hasil perhitungan SPSS 27, 2023*

Hasil output menunjukkan :

- 1) Pengelolaan Keuangan Desa : menunjukkan bahwa jumlah responden (N) 44, dari 44 responden ini pengelolaan keuangan desa terkecil (minimum) adalah 56 dan terbesar (maksimum) 70. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa dari 44 responden adalah 63,64 dengan standar deviasi 4,755.
- 2) Sistem Pengendalian Internal : menunjukkan bahwa jumlah responden (N) 44, dari 44 responden ini sistem pengendalian internal terkecil (minimum) adalah 45 dan terbesar (maksimum) 60. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan sistem pengendalian internal dari 44 responden adalah 52,52 dengan standar deviasi 3,151.
- 3) Akuntabilitas APBDes : menunjukkan bahwa jumlah responden (N) 44, dari 44 responden ini akuntabilitas APBDes terkecil (minimum) adalah 39 dan terbesar (maksimum) 50. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan akuntabilitas APBDes dari 44 responden adalah 44,32 dengan standar deviasi 3,502.

#### b. Uji Asumsi Klasik

- 1) Uji Normalitas Data



**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas data**

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, artinya hasil Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas APBDes dapat disimpulkan semua data berdistribusi normal. Dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga syarat normalitas nilai residual untuk analisis regresi dapat terpenuhi.

**Tabel 3**  
**Hasil uji normalitas menggunakan SPSS Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			44
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.53163265	
Most Extreme Differences	Absolute	.099	
	Positive	.060	
	Negative	-.099	
Test Statistic			.099
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			.200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.323	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.311
		Upper Bound	.335
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

*Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 27, 2023*

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai signifikan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar  $0.200 \geq 0,05$ . Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

2) Uji Multikolonieritas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

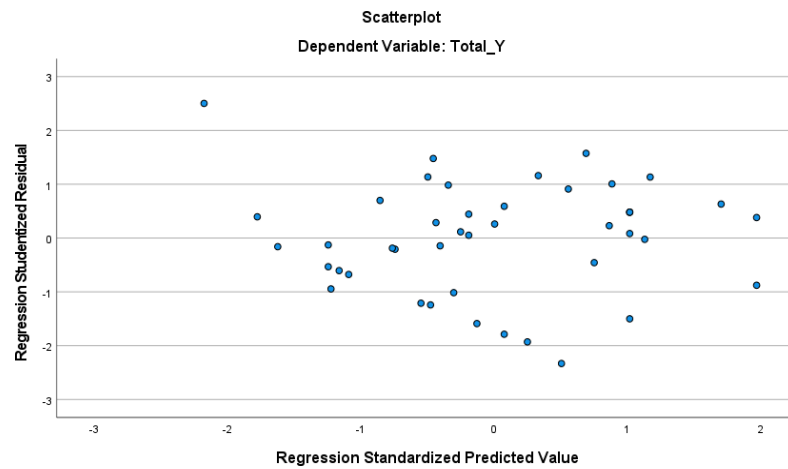
Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.766	7.039		.535	.596		
	Pengelolaan Keuangan Desa (X1)	.371	.095	.504	3.926	.000	.772	1.295
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.322	.143	.290	2.256	.029	.772	1.295

a. Dependent Variable: akuntabilitas APBDes (Y)

*Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 27, 2023*

Berdasarkan tabel 4 Output “*coefficients*” pada bagian “*collinearity statistics*” diketahui nilai *tolerance* untuk variabel Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) adalah  $0,772 < 0,10$ . Sementara nilai *VIF* untuk variabel Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) adalah  $1,295 < 10,00$ . Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam model regresi.

3) Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 27, 2023

Gambar 2  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 hasil uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

c. Koefisien Korelasi

Tabel 5  
Korelasi variabel Pengelolaan keuangan desa dan Sistem pengendalian internal

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.691 <sup>a</sup>	.478	.452	2.593	.478	18.741	2	41	.000

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 27, 2023

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai sig  $< 0,000$  sehingga dinyatakan korelasi antar variabel dan nilai R 0,691 artinya terdapat hubungan yang kuat antara Pengelolaan keuangan desa dan Sistem pengendalian internal. Berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi berada pada rentang nilai 0,61-0,80 yang berarti tingkat hubungan pengelolaan keuangan desa dengan sistem pengendalian internal termasuk pada tingkat hubungan yang kuat.

d. Analisis Regresi Berganda

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.766	7.039		.535	.596
	Pengelolaan Keuangan Desa (X1)	.371	.095	.504	3.926	.000
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.322	.143	.290	2.256	.029

a. Dependent Variable: Akuntabilitas APBDes (Y)

*Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 27, 2023*

Persamaan regresi yang menjelaskan Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa (X<sub>1</sub>) dan Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) terhadap Akuntabilitas APBDes (Y) berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda pada tabel 6 sebagai berikut:

$$Y = 3,766 + 0,371 X_1 + 0,322 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa (X<sub>1</sub>) terhadap Akuntabilitas APBDes (Y) pada Desa-desa di Kecamatan Pamulihan

Nilai koefisien regresi variabel Pengelolaan Keuangan Desa (X<sub>1</sub>) terhadap Variabel Akuntabilitas APBDes (Y) yang berarti, jika Pengelolaan Keuangan Desa (X<sub>1</sub>) mengalami kenaikan satu satuan maka Akuntabilitas APBDes (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,371 dan koefisien bernilai positif yang artinya antara Pengelolaan Keuangan Desa (X<sub>1</sub>) dan Akuntabilitas APBDes (Y) memiliki hubungan yang positif.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) terhadap Akuntabilitas APBDes (Y) pada Desa-desa di Kecamatan Pamulihan

Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) terhadap Variabel Akuntabilitas APBDes (Y) yang berarti, jika Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) mengalami kenaikan satu satuan maka Akuntabilitas APBDes (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,322 dengan koefisien bernilai positif yang artinya antara Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) dan Variabel Akuntabilitas APBDes (Y) mempunyai hubungan yang positif.

e. Pengujian Hipotesis

- 1) Uji t

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.766	7.039		.535	.596		
	Pengelolaan Keuangan Desa (X1)	.371	.095	.504	3.926	.000	.772	1.295
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.322	.143	.290	2.256	.029	.772	1.295

a. Dependent Variable: akuntabilitas APBDes (Y)

*Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 27, 2023*



Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan hasil perhitungan untuk uji t sebagai berikut:

1. Nilai  $t_{hitung} 3.926 > t_{tabel} 2.018$  dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$  sehingga  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak artinya Pengelolaan Keuangan Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBDes.
  2. Nilai  $t_{hitung} 2.256 > t_{tabel} 2.018$  dengan tingkat signifikansi  $0.029 < 0.05$  sehingga  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak artinya Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBDes.
- 2) Uji F

**Tabel 8**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	251.951	2	125.976	18.741	.000 <sup>b</sup>
	Residual	275.594	41	6.722		
	Total	527.545	43			
a. Dependent Variable: akuntabilitas APBDes (Y)						
b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> ), Pengelolaan Keuangan Desa (X <sub>1</sub> )						

*Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 27, 2023*

Berdasarkan tabel 4.59 diatas menunjukkan hasil perhitungan untuk uji F yaitu  $F_{hitung} 18.741 > F_{tabel} 3.23$  dengan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F bahwa hipotesis diterima. Pengelolaan Keuangan Desa (X<sub>1</sub>) dan Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas APBDes (Y).

- 3) Uji Determinasi  
a) Uji Determinasi Parsial

**Tabel 9**  
**Koefisien determinasi parsial**

Variabel	Standarized Coefficient (Beta)	Koefisien Korelasi	Nilai (%)	R Square (%)
X <sub>1</sub>	0,504	0,642	32,4	47,8
X <sub>2</sub>	0,29	0,53	15,4	

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023*

Besarnya pengaruh dari Pengelolaan Keuangan Desa (X<sub>1</sub>) terhadap Akuntabilitas APBDes (Y) sebesar 32,4 %. Sedangkan besarnya pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) terhadap Akuntabilitas APBDes (Y) sebesar 15,4 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang paling berpengaruh terhadap Akuntabilitas APBDes adalah Pengelolaan keuangan desa sebesar 32,4 %.

b) Uji Determinasi Simultan

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 <sup>a</sup>	.478	.452	2.59264
a. Predictors: (Constant), X <sub>2</sub> , X <sub>1</sub>				
b. Dependent Variable: Y				

*Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 27, 2023*

Besarnya pengaruh dari Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ ) dapat dilihat dari nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Hasil perhitungan menunjukkan nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) diperoleh sebesar 0.478. Jadi, Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) memberi pengaruh terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ ) sebesar 47,8%, dan selebihnya yaitu sebesar 52,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Discussion

Secara empiris bahwa pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas APBDes. Dalam hal ini, sistem pengendalian internal seharusnya dimanfaatkan dengan baik agar dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik, serta pemerintah harus tetap memperhatikan agar setiap desa lebih meningkatkan lagi terkait akuntabilitas APBDes. Secara teoritis hasil penelitian sebagai berikut :

### 1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas APBDes pada Desa-desa di Kecamatan Pamulihan

Melalui analisis regresi dapat diketahui bahwa Pengelolaan keuangan desa memberikan pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas APBDes dengan koefisien 0,371. Besarnya koefisien Pengelolaan keuangan desa paling tinggi jika dibandingkan dengan koefisien Sistem pengendalian internal. Sehingga Pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap Akuntabilitas APBDes jika dibandingkan dengan variabel independen yang lain.

Berdasarkan hasil uji statistik t bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ ). Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} 3.926 > t_{tabel} 2.018$  dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$  sehingga  $H_1$  diterima artinya Pengelolaan Keuangan Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBDes.

Hasil pengujian hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa semakin baik Pengelolaan keuangan desa maka akan semakin meningkatkan Akuntabilitas APBDes.

### 2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas APBDes pada Desa-desa di Kecamatan Pamulihan

Melalui analisis regresi dapat diketahui bahwa Sistem pengendalian internal memberikan pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas APBDes dengan koefisien 0,322. Besarnya koefisien Sistem pengendalian internal lebih rendah dibandingkan dengan koefisien Pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil uji statistik t bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ ). Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} 2.256 > t_{tabel} 2.018$  dengan tingkat signifikansi  $0.029 < 0.05$  sehingga  $H_2$  diterima artinya Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBDes.

Hasil pengujian hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa semakin baik Sistem pengendalian internal, maka akan semakin baik Akuntabilitas APBDes. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah, (2020) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa.

**3. Hubungan Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas APBDes pada Desa-desa di Kecamatan Pamulihan**

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai  $\text{sig} < 0,000$  sehingga dinyatakan korelasi antar variabel dan nilai  $R\ 0,691$  artinya terdapat hubungan yang kuat antara Pengelolaan keuangan desa dan Sistem pengendalian internal. Berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi berada pada rentang nilai  $0,61-0,80$  yang berarti tingkat hubungan pengelolaan keuangan desa dengan sistem pengendalian internal termasuk pada tingkat hubungan yang kuat.

**4. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas APBDes pada Desa-desa di Kecamatan Pamulihan**

Berdasarkan hasil perhitungan uji F diperoleh bahwa nilai  $F_{\text{hitung}}\ 18,741 > F_{\text{tabel}}\ 3,23$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F bahwa hipotesis diterima. Sehingga  $H_1$ ,  $H_2$  dan  $H_3$  diterima, artinya Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ ).

## CONCLUSION

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti terkait Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas APBDes pada Desa-desa di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_1$ ) terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ )

Berdasarkan hasil uji statistik  $t$  menunjukkan bahwa nilai  $t_{\text{hitung}}\ 3,926 > t_{\text{tabel}}\ 2,018$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . yang artinya  $H_1$  diterima. Maka, variabel Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ ).

Melalui analisis regresi dapat diketahui bahwa Pengelolaan keuangan desa memberikan pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas APBDes dengan koefisien  $0,371$ .

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ )

Berdasarkan hasil uji statistik  $t$  menunjukkan bahwa nilai  $t_{\text{hitung}}\ 2,256 > t_{\text{tabel}}\ 2,018$  dengan tingkat signifikansi  $0,029 < 0,05$ . yang artinya  $H_2$  diterima. Maka variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ ).

Melalui analisis regresi dapat diketahui bahwa Sistem pengendalian internal memberikan pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas APBDes dengan koefisien  $0,322$ .

3. Hubungan Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas APBDes pada Desa-desa di Kecamatan Pamulihan

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai  $\text{sig} < 0,000$  sehingga dinyatakan korelasi antar variabel dan nilai  $R\ 0,691$  artinya terdapat hubungan yang kuat antara Pengelolaan keuangan desa dan Sistem pengendalian internal. Berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi berada pada rentang nilai  $0,61-0,80$  yang berarti tingkat hubungan pengelolaan keuangan desa dengan sistem pengendalian internal termasuk pada tingkat hubungan yang kuat.

4. Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ )

Berdasarkan uji F menunjukkan hasil bahwa nilai  $F$  hitung adalah  $18,741$ , sedangkan untuk signifikansinya adalah  $0,000$  lebih kecil dari  $0,05$ . Sehingga,  $F_{\text{hitung}}\ 18,741 > F_{\text{tabel}}\ 3,23$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . artinya  $H_3$  diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa

Pengelolaan Keuangan Desa ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas APBDes ( $Y$ ).

Peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini, oleh karena itu hasil penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, namun demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi terkait pertanggungjawaban terhadap APBDes agar lebih terbuka kepada masyarakat terkait kebijakan dan program yang ditetapkan .
2. Sistem pengendalian internal pada setiap desa di Kecamatan Pamulihan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi terkait pemantauan terhadap pelaksanaan APBDes agar dapat mendukung pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa.
3. Pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal pada setiap desa sedikitnya sudah berjalan dengan baik dalam pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas APBDes, namun masih perlu adanya peningkatan terhadap akuntabilitas APBDes baik dalam akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

## REFERENCES

- Afriansyah, Mufti Arief. (2020). “Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Journal of Islamic Finance and Economic*. Vol 3 (1). 67-82.
- Anggara, S. (2022). *Akuntabilitas Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Chalimatus, S.A. (2021). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya Good Village Governance (Studi Kasus Pada Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*.
- Dharmakarja, dkk. (2020). “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa”. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. Vol. 4 (2). 31-40.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Hilman, Y.A, dan Rahayu, W.A. (2020). “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Periode Tahun Anggaran 2014 – 2019”. *Journal of Governance and Local Politics*. Vol. 2, (1). 1-24.
- Husain, P.S dan Seber, I.S. (2023). “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. *Jambura Accounting Review*. Vol. 4, (1). 66-76.
- Ilhami, M., dan Widhiastuti, R. (2022). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa”. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 10, (2). 185-198.
- Inna, Nurul. (2021). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Anggaran Pemerintah Desa Pada Bagian Keuangan Kantor Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah : Makassar.

- Karawisan, S.F.A, dkk., (2023). “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Penatausahaan APBDes di Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)*. Vol. 6, (2). 1513-1518.
- Kartika, T. (2022). “Management And Reporting Of Financial Reports Through The Village Financial System Application (SISKEUDES) (Case Study Of Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang)”. *Journal of Business Accounting and Finance*. Vol. 4, (2). 55-62.
- Kecamatan Pamulihan Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Laporan Pertanggungjawaban. 2022. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Laporan Pertanggungjawaban. 2022. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Desa Sukawangi Kabupaten Sumedang.
- Laporan Pertanggungjawaban. 2022. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Desa Citali Kabupaten Sumedang.
- Laporan Pertanggungjawaban. 2022. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Desa Ciptasari Kabupaten Sumedang.
- Laporan Pertanggungjawaban. 2022. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Desa Haurngombong Kabupaten Sumedang.
- Laporan Pertanggungjawaban. 2022. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Desa Mekarbakti Kabupaten Sumedang.
- Laporan Pertanggungjawaban. 2022. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Desa Cilembu Kabupaten Sumedang.
- Laporan Pertanggungjawaban. 2022. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Desa Cigendel Kabupaten Sumedang.
- Laporan Pertanggungjawaban. 2022. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Desa Cinanggerang Kabupaten Sumedang.
- Laporan Pertanggungjawaban. 2022. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Desa Cijeruk Kabupaten Sumedang.
- Machfiroh, I. S. (2018). “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Benua Tengah”. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*. Vol. 1, (1). 14-21.
- Hantono, (2020). *Metode Penelitian Skripsi dengan Aplikasi SPSS*. Deepublish.
- Mualifu, dkk. (2019). “Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”. *Journal Of Economic, Business and Engineering (JEBE)*. Vol. 1, (1). 49-59.
- Nugroho, A.T., et.al. (2022). “Pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa di kabupaten ngawi)”. *Jurnal Ilmiah Edunomika*. Vol. 6, (2). 1-9.
- Nurchahya, Deni. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol. 2, (9). 1519-1534.

- Peraturan Lengkap Desa . *Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pitaloka, H., dkk. (2020). “Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Perspektif ‘‘COSO’’ di desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang”. *Jurnal Ekonomi, sosial & humaniora*. Vol. 01, (8). 1-11.
- Priadana, S., dan Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang : Pascal Books.
- Raharjo, M.M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rahmayani dan Kurnadi. (2022). “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten)”. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 3, (2). 703-713.
- Rukayat, Y. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa & Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta : Bee Media Pustaka.
- Saputra, D.N. dkk. (2021). “Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*. Vol. 3. 238- 252.
- Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor: In Media.
- Somantri, Y.F., dan Nanda U.L (2019). “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya”. *Eko Preneur*. Vol. 1,(1). 126-132.
- Sucahyo, Heru. (2019). “Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur”. *Jurnal Pembangunan dan Inovasi*. Vol 1 (1). 33-46.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, Dadang dan Dailibas. (2016). *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Usman, D., dkk. (2020). “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pungka Tahun Anggaran 2019”. *Nusantara Journal of Economics*. Vol 2, (2). 83-91.
- Yuliasuti, V., dkk. (2022). “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa”. *Bussman Journal*. Vol 2, (3). 502-518.
- Widoyoko, Eko Putra. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka